

## LAMPIRAN I

### Transkrip Wawancara Kementerian Ketenagakerjaan RI

Tanggal : 7 Desember 2023

Media : *Zoom Meeting*

Narasumber : Iwan Pujosemedi, MBA.

Jabatan : Sub-Koordinator Kemitraan Luar Negeri Ketenagakerjaan RI

Keterangan:

A = Pewawancara

I = Narasumber

A: Assalamualaikum, Pak Iwan. Selamat pagi.

I: Waalaikumussalam. Pagi.

A: Sebelumnya terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya hari ini. Perkenalkan nama saya Ahlana Sabrina Rinaldi. Saya mahasiswi semester akhir program studi Hubungan Internasional Universitas Diponegoro dan saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya yang berjudul “*Six Years of Indecision: Lika-Liku Negosiasi Indonesia-Malaysia atas MoU Perlindungan PMID (2016-2022)*”. Sebelumnya saya izin untuk merekam wawancaranya sebagai bukti penelitian apakah boleh, Pak?

I: Boleh, silahkan.

A: Baik. Terima kasih, Pak. Saya izin mulai dan bacakan pertanyaannya ya, Pak. Pertanyaan pertamanya, saya ingin bertanya, Pak. Bagaimana peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam proses negosiasi MOU penelan PMD kemarin, Pak?

I: Baik, sebenarnya bagaimana peran Kemenaker, saya bisa mengatakan perannya sangat besar. Karena memang MOU ini adalah MOU yang mengatakan atur ketenagakerjaan, di mana itu adalah tugas dan fungsi dari Kemenaker terkait dengan ketenagakerjaan. Namun dalam penyusunannya, kita tidak mungkin berdiri sendiri.

Tentu saja kita ada teman-teman dari perwakilan, teman-teman dari Kementerian Luar Negeri, teman-teman dari BP2MI, dan mungkin ada teman-teman juga dari imigrasi dan dari Kementerian Kesehatan. Karena memang ini menyangkut banyak aspek. Tapi memang Leading Sectornya adalah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan.

A: Nah, kebetulan kemarin saya sudah mewawancarai Pak Atas Ketenagakerjaan di KBL juga, Pak

I: Mas Erga?

A: Oh iya, Pak Erga, Pak.

A: Itu juga kan beliau menyebut bahwa Kemenaker itu berperan sebagai ketua delegasi dari Indonesia, gitu ya. Ketua perwakilan. Karena tadi saya sampaikan bahwa karena ini adalah bidang ketenagakerjaan, maka leading sectornya adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Ketua perwakilan Ketenagakerjaan.

Jadi kalau ada satu tim, tiap kali kita bernegosiasi kan pasti, tadi saya sampaikan, nggak mungkin sendiri, pasti melibatkan Kementerian Lembaga terkait yang lainnya. Termasuk ya itu, dari Kementerian Luar Negeri terutama, dari perwakilan juga tempatnya Mas Erga, terus ada juga dari teman-teman Kementerian Kesehatan, juga dengan teman-teman dari imigrasi, dari BP2MI, itu semuanya ikut membantu dalam menyusun MoU ini. Terutama posisi Indonesia, kan. Itu.

A: Baik, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya, Pak. Proses inisiasi awal rancangan MoU yang terbaru, itu kan berarti kan pembaruan MoU dari MoU 2011, ya, Pak? Kalau begitu bagaimana ya, Pak, perancangan awalnya begitu?

I: Awalnya sebenarnya diawali dengan ada kunjungan kedua kepala negara, kalau tidak salah Presiden kita datang ke Malaysia, saya agak lupa, tapi itu tahun 2015. Intinya kedua kepala negara bertemu, dan mereka sepakat. Ini perlu adanya suatu sistem yang bisa mengintegrasikan antara sistem Indonesia dan sistem Malaysia. Nah, dari situ, akhirnya kita diperintahkan pimpinan untuk menyusun MoU.

A: Nah, dari untuk menyesuaikan mereka, ini kan pasti biasanya kalau kita dari KBRI, kita biasanya memberikan kepada kita *draft fax*. Bahwa pemerintah Malaysia mau memperbarui MoU, karena MoU-nya kan habis, nih. Kita minta terus

sama diskusi sama mereka, akhirnya, okelah kita sepakat mau bertemu. Nah, dari itu kita menindaklanjuti untuk mengadakan interkem, Mbak. Rapat interkem Kita memasukkan norma-norma yang kira-kira bisa melindungi pekerja migran Indonesia di sana untuk sektor domestik utamanya. Nah, di situ kita... Menyusun kerangka bersama, termasuk dari pihak ini juga, dari KBRI Malaysia.

I: Biasanya kemarin itu lebih enak lagi karena Pak Dubes juga secara aktif ikut membantu kami. Jadi, kan terus terang yang paham kondisi Malaysia itu adalah KBRI. Mereka memberikan banyak masukan kepada kami, jadi kami bisa nyusun dari pusat. Tapi bisa nyusun kira-kira yang dibutuhkan apa dengan kondisi seperti ini dalam memberikan perlindungan yang maksimum kepada PMI. Nah, setelah kita melalui lumayan diskus yang panjang, akhirnya kita berhasil menyusun draft posisi Indonesia istilahnya. Nah, draf posisi Indonesia itu akhirnya kita sampaikan kepada pihak Malaysia. Nah, Malaysia akhirnya meng-*counter* dengan drafnya mereka. Jadi, seperti itu, Mbak. Sampai akhirnya nanti ketemu, kalau sudah sepakat ya sudah bisa tanda-tangan. Intinya seperti itu sih, Mbak

A: Mungkin, nah ini Pak, yang jadi sebenarnya ini jadi pertanyaan-pertanyaan saya juga, Pak. Kan, berarti kan draf posisinya pertama kali disampaikan itu di sekitar tahun 2016-an ya, Pak, kalau tidak salah. 2016-an. Setelah MoU yang sebelumnya expired ya, Pak ya. Mengapa agak ada gap yang cukup lama sampai akhirnya MOU yang terakhir itu disetujui tahun 2022 gitu, Pak. Kenapa waktunya jadi lama ya?

I: Karena memang, terus terang, MoU ini kan istilahnya menjembatani kepentingan dua negara. Jadi, kan, peraturan nasional kita dengan peraturan nasionalnya Malaysia belum tentu sama. Ya, kan. Undang-undangnya pasti, karena berbeda. Berbeda dan situasi politik juga itu ikut mempengaruhi kelancaran dari penyusunan MoU. Makanya itu waktunya memang saya bilang terlalu lama sih penyusunan itu. Tapi, memang akhirnya setelah pas ke Covid ya, itu bisa bergerak dengan cepat.

A: Pak, ini juga jadi pertanyaan saya, Pak. Berarti kan tadi Bapak bilang ada perbedaan kepentingan. Berarti ya, Pak, intinya Indonesia dan Malaysia begitu.

I: Ya, sebenarnya yang penting ini selain kepentingan, regulasinya sih, Mbak

A: Sepaham saya, Pak, dari yang saya baca, itu kan Indonesia yang mengeluarkan kebijakan baru itu ya, Pak. Yang tahun 2018, eh 2017. UU 18 tahun 2017 itu. Dan

itu berseberangan dengan ini ya, Pak, SMO atau Sistem *direct hiring*-nya Malaysia begitu ya, Pak. Apakah itu mempengaruhi itu juga proses negosiasinya, Pak?

I: Jadi gini, SMO atau apa sih, ada *Maid Online*-nya itu saya lupa. SMO itu memang kan hasil dari kebijakan Malaysia. Dan itu adalah membolehkan pemberi kerja itu merekrut secara langsung, kalau tidak salah. Betul kan? Nah, sedangkan di aturan kita. Tidak boleh ada perekrutan langsung dari pemberi kerja. Yang kita, di aturan kita di UU 18 tahun 2017. Terutama untuk sektor domestik, itu harus melalui perusahaan penempatan. Kita disebutnya P3MI, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Jadi tidak boleh secara perseorangan atau *direct hiring*. Nah, memang yang menjadi kendala juga adalah SMO ini sebenarnya tidak di bawah Kementerian Sumber Manusia. Mereka kalau tidak salah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga memang di situ negosiasinya agak susah. Karena akhirnya kita pahami juga bahwa pihak Kementerian Sumber Manusiannya itu, Malaysia itu mereka tidak bisa. Apa ya? Merubah aturan itu tanpa seizin dari KDN. Oleh sebab itu setelah berjalannya waktu perundingan terus-menerus, akhirnya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dari keputusan senatnya atau apa itu, akhirnya mereka memberikan hak kepada Kementerian Sumber Manusia untuk menangani pendapatan pekerja migran. Itu sektor domestik. Jadi memang intinya sih, ya itu sebenarnya karena perbedaan kebijakan dalam negeri. Mereka sama kita, salah satu jenis yang tadi Mbak kasih tahu yang SMO itu, ya itu yang salah satu menyebabkan kenapa perundingan itu sangat lama sekali ya Mbak.

A: Terima kasih Pak. Berarti dalam proses negosiasi ini di pihak Malaysia hanya Kementerian Sumber Daya Manusia saja Pak?

I: Ya, memang kami bernegosiasi hanya dengan Kementerian Sumber Manusia pada saat itu. Dan memang yang menandatangani juga Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Ketenagakerjaan. Cuma ya memang sebenarnya tidak hanya di Malaysia sih. Saya agak melebar sedikit seperti kita dengan Timur Tengah dan UAE. Itu yang kita tanda pemeriksaan mereka, Ministry of Human Resources itu yang mengurus manusia, ya hanya mengurus kebijakannya dia. Sehingga kita sekarang juga terjadi *deadlock* karena ada satu kebijakan mereka konversi visa. Itu yang tidak bisa di mereka lakukan, dihapus sama mereka. Sehingga sampai

sekarang *deadlock*. Karena masalah konversi visa itu adalah dibawahnya itu. Jadi kita harus mengajak imigrasi. Dan mereka sepertinya agak ralutan untuk mengajak imigrasi. Jadi sehingga terjadi *deadlock* di situ, kita terus memaksa untuk itu. Tapi mereka juga tidak bisa. Sebenarnya kejadiannya sama seperti Malaysia juga awalnya.

A: Oh ya, baik Pak. Lalu mungkin yang selanjutnya saya ingin bertanya Pak. Berarti kan itu kan waktunya cukup lama. 6 tahun itu ya Pak. Terlalu lama ya. Itu perbedaan yang paling mendasar gitu Pak. Dari tidak adanya MoU dengan adanya MoU mungkin bagi kemenaker dalam melindungi pekerja migran itu gimana ya Pak?

I: Bagi Indonesia mungkin saya bilang. Pertama, yang utama di dalam MoU kita ini adalah dengan menggunakan *one channel system*. Artinya apa? Sistem kita terintegrasi dengan sistem mereka. Nah di situ kelebihanannya apa? Berdasarkan undang-undang tahun 2017. Kita kan memang harus adanya integrasi sistem. Nah di situ data-data calon pekerja migran Indonesia semuanya lengkap. Dia nanti bekerja sama dengan siapa, gajinya berapa, apakah sudah dibayar atau belum gajinya. Itu nanti dengan sistem itu semuanya bisa terlihat. Dan nanti kalau seandainya ada masalah dia mau kembali pulang ke siapa, itu jelas gitu. Jadi tidak pusing mencari ininya. Oh ini aslinya dari mana. Jadi karena memang berdasarkan undang-undang tahun 2017 itu.

A: Itu kan dia harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pekerja migran kita Mbak. Itu salah satu syaratnya itu apa ya kemarin ya Pak?

I: Kita harus lihat dulu. Ya dari segi usia, Terus dia harus memiliki, Dia harus sehat jasmani, rohani. Dia harus memiliki dokumen. Dia harus memiliki kompetensi. Jadi di sini memang di undang-undang 18 tahun 2017 itu, Si yang utama adalah pekerja migran itu diperlakukan sebagai subjek. Bukan sebagai objek. Itu artinya, Jadi dia pekerja migran mau pergi bekerja ke luar negeri itu adalah pilihan dia. Bukan paksaan dari orang lain. Bukan karena rayuan dari orang lain. Nah di situ, Makanya si calon pekerja migran itu harus dibekali dengan kompetensi. Kayak misalnya dia mau menjadi juru masak. Kan di sini kalau gak salah ada 4 atau 5 gitu, Jenis pekerjaan yang dipekerjakan di Malaysia. Seandainya dia memilih menjadi juru masak. Maka dia harus dibekali dengan keahlian sebagai juru masak. Karena

kompetensi ini adalah salah satu bentuk dari perlindungan pekerja migran di Indonesia. Ketika dia yang tidak punya kompetensi atau kompetensinya tidak sesuai, Maka nanti bisa aja kan majikannya jadi kesel nih. Udah biaya mendapatkannya mahal untuk menggaji calon pekerja migran ini. Tapi ternyata gak bisa kerja. Itu kan sebetulnya juga perlindungan konsumen juga. Si pemberi kerjanya juga. Juga kepada pekerja migrannya. Terus jadi sehat, jasmani, dan rohani. Jangan sampai kita kirimkan pekerja migran kita yang sakit. Sampai di sana nanti dipulangi lagi. Kasian juga dari pekerja migrannya. Kasian. Si pemberi kerjanya juga kena. Kasian. Gitu mbak. Jadi memang setelah mereka datanya semua lengkap, Mereka silahkan mendaftar. Nanti dibantu oleh P3MI juga ditempatkan. Jadi memang Undang-Undang 18 Tahun 2017 itu Benar-benar bisa melindungi pekerja migran Indonesia.

A: Berarti kalau yang formal itu sistemnya G2G kah pak?

I: Formal bisa P2P, biasanya bisa bisnis-bisnis kita. Dan dia bisa persoarangan. Kalau dia untuk profesional, formal, itu persoarangan gak masalah. Kita kan yang lebih, bukan lebih mending, tapi apa ya, yang perlu memberikan perlindungan lebih adalah yang di sektor domestik. Karena di sektor domestik itu sangat rawan.

Makanya di situ kita bisa, kita bahkan di Malaysia pun kita syarkan gaji minimal harus berapa? Kalau gak salah RM 1.500. Mungkin Mas Erga udah bilang. Dan di situ juga gajinya si calon pemberi kerja harus ada. Kira-kira berapa ringgit saya lupa. Mungkin Mas Erga banyak apa, ini ada infonya. Kalau gak salah RM 7.000 itu minimum gaji yang harus dimiliki oleh si pemberi kerja. Karena kita gak mau juga. Mereka gajinya sedikit kok bisa *hire* pekerja kita. Jangan-jangan nanti malah gak dibayar gitu kan. Nah itu salah satu perlindungan seperti itu mbak.

A: Baik pak. Pak kan tadi ngomongin gaji juga ya pak. Ini saya jadi ingin bertanya lagi. Alasan mengapa Malaysia mengeluarkan sistem *maid online* itu kan untuk mengurangi biaya penempatan ya, Pak. Karena bagi orang Malaysia biaya penempatan PMID melalui agen itu terlalu mahal, sedangkan melalui *maid online* dianggap lebih efektif dan efisien. Nah itu bagaimana strategi Indonesia pak dalam mempengaruhi dan meyakinkan Malaysia kalau sistem OCS itu lebih baik dibanding sistem *maid online*?

I: Mungkin lebih *simple* ya, kalau dibilang efektif saya gak tahu juga. Karena mereka langsung (*direct-hiring*) begitu, dari sisi perlindungannya saya gak tahu. Karena kan ketika mereka merekrut pekerja secara langsung, mungkin murah ya. Tapi kalau efektif gak tahu juga. Karena gini, dia meng-hire orang yang belum tentu dia sudah dilatih apa belum. Ternyata gak bisa bekerja. Disiksa lagi. Majikan ini padahal juga udah keluar duit juga tuh dengan *maid online*. Siapa yang mau menjamin? Kita rugi? Dia sebenarnya juga rugi kan kalau begitu. Ada pembiaran mempekerjakan orang secara ilegal. Karena apa? Mereka bisa dapatnya murah nih. Kan mereka nyarinya gitu murah-murah-murah. Tapi mereka gak memperhatikan kesejahteraan pekerjanya. Dan itu yang menjadi salah satu pasal dalam MoU yang baru. Jika majikan itu ketahuan mempekerjakan pekerja secara ilegal. Maka dia akan dihukum. Jadi memang gak boleh. Jadi kalau sistem *maid online* itu memang dibilang murah ya lebih murah. Apakah terjamin? Gak tahu juga.

A: Berarti posisi Indonesia ini menyakitkan Malaysia itu bahwa kalau lewat *one channel system* itu sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak juga ya Pak.

I: Iya, betul

A: Majikannya juga bisa mendapatkan jaminan kalau memang pekerjanya ini bakal bagus kerjanya. Jadi itu bentuk perlindungan buat mereka juga ya.

I: Ini udah dijaminin. Orangnya udah kita latih. Masa khawatir kalau secara legal. Jangan sampai kita ngirim orang sakit ke sana, nanti majikannya juga bahaya.

A: Berarti itu tadi kan Bapak sebelumnya juga sempat menyebut kalau negosiasinya itu mulai lancar abis pasca Covid kan ya Pak ya. Apakah Covid itu sebenarnya juga memberi pengaruh terhadap kayak kelancaran negosiasi ini?

I: Kalau saya gak tahu ya itu apa memberikan pengaruh apa enggak. Tapi mungkin Mbak bisa menilai sendiri. Apakah Covid itu sebenarnya juga memberi pengaruh gitu Pak terhadap kayak kelancaran negosiasi ini gitu? Kalau saya gak tahu ya itu memberikan pengaruh apa enggak. Tapi setelah Covid mereka memang butuh lagi nih pekerja. Kemudian kita juga memang ada surplus tenaga kerja. Dibilang itu apakah itu mempengaruhi saya gak paham juga ya. Cuma pada kenyataannya memang pekerjaan migran Indonesia itu memang dibutuhkan oleh banyak negara. Saat Covid mereka tidak bisa bekerja. Jadi memang dari dulu sih kebutuhan

pekerjaan migran Indonesia itu banyak banget dimana-mana. Karena orang kita terkenal luwes, santun. Terus bekerjanya bagus lagi gitu kan. Jadi kalau apakah itu ada pengaruhnya sama Covid saya gak tahu ya.

A: Baik, jadi kita butuh mengirim tenaga kerja kita gitu ya, Pak? Nah itu berarti keduanya kan berarti ya sama-sama butuh gitu ya, Pak. Kalau begitu, bagaimana cara Indonesia dan Malaysia itu Pak berkompromi gitu ya. Akhirnya menyetujui pada di MoU tersebut.

I: Jadi begini, memang pada saat Covid kan seluruh pekerja Indonesia ini kita berhentikan pengirimannya baik sektor formal maupun domestik ke seluruh negara. Akhirnya setelah Covid mulai reda dan juga mempertimbangkan mereka mau kerja, satu-satu kita buka pengiriman ke negara kaun. Nah untuk Malaysia waktu itu memang sengaja belum tidak kita buka. Baik untuk formal maupun yang sektor domestik. Kenapa? Karena terus terang memang pada saat itu pihak Malaysia agak susah diajak untuk berunding lagi. Akan tetapi atas bantuan teman-teman info dari KBRI sama Pak Dubes serta arahan dari pemerintah pusat juga, akhirnya okelah, coba kita tutup nih sektor formalnya. Jadi waktu itu yang diutamakan Malaysia pekerja di sektor ladang. Nah mereka tuh orang Malaysia itu kan butuh sekali pekerja ladang Mbak. Sektor formal tuh. Kalau mereka tidak mendapatkan pekerja ladang dari Indonesia. Mereka gak bisa cari di sembarangan. Karena kualitasnya beda. Nah itu ladang mereka kan busuk semua. Hasil landang mereka busuk semua. Akhirnya posisi kita sedikit lebih di atas saat itu. Setelah itu memang saya akui perundingan jadi lebih mudah. Jadi sektor formal kita tutup. Ini membantu mereka untuk bernegosiasi kembali di untuk sektor rumah tangga atau domestik.

A: Baik Pak. Berarti mungkin singkatnya berarti Indonesia tuh memakai strategi negosiasi dengan menggunakan kenyataan bahwa Malaysia tuh butuh pekerja sektor formal. Tapi kita gak mau ngirim kalau mereka gak mau berunding gitu ya, Pak?

I: Banyak digunakan sama banyak negara kok, Mbak. Kita pun menggunakan strategi ini ke UAE. Mereka di awal-awalnya juga tidak mau. Kan ada sektor formal juga dengan sektor rumah tangga. Sedangkan kita maunya sektor yang formal ini ditandatangani lebih dulu. Karena kan banyak pekerja formal kita yang ke UAE,



bekerja di minyak lah segala macam. Nah itu, mereka awalnya tidak mau. Akhirnya yaudahlah. Kita sepakat dan bahas dua-duanya. Nah dari situ baru kita ada perkembangan. Walaupun akhirnya *deadlock* juga. Karena tadi masalah konversi visa juga. Gitu Mbak.

A: Jadi intinya dicari *win-win solution* gitu ya Pak.

I: Iya harus dicari ya. Kalau enggak ya *deadlock* aja terus.

A: Tapi saya juga. Kemarin kan baca Pak. Walaupun sudah setuju tapi Ujung-ujungnya ditemukan masih ada pelanggaran. Apa memang di Malaysia tuh sesusah itu ya, Pak, untuk mengatur pekerja migran?

I: Terus terang saya yakin pasti masih banyak pekerja migran yang datang ke Malaysia secara ilegal. Karena apa? Jalan tikus. Yang pertama jalan tikus itu. Yang membatasi antara Indonesia dengan. Malaysia itu kan susah banget. Enggak mungkin di tutup semua. Imigrasi sama petugas perbatasan. Susah juga menutup semua, sebanyak itu mereka pasti dengan calon-calon itu ada yang masuk dan juga yang kedua ada salah satu daerah di Indonesia terutama bilang kalau tidak salah itu di NTT itu mereka punya *mindset* kalau tidak bekerja ke Malaysia itu mereka belum bekerja. Nah itu, mendorong mereka bekerja untuk sana dengan cara apapun sehingga gampang kena kalau ada rayuan dari calo. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa kalau bekerja itu lewat jalur yang aman yang jelas yang pasti yang sesuai dengan undang-undang dan aturan kenapa dia dan keluarganya jadi terlindungi.

A: Berarti tidak hanya mengusahakan MoU sebagai kerjasama antarnegara Indonesia juga menguasai secara internal juga ya, Pak?

I: Betul. Jadi memang tujuannya kemarin juga penutupan itu juga dilakukan untuk membenahi tata kelola penempatan Indonesia juga.

A: Baik, Pak. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi, Pak. Di dalam negosiasi ini ada berapa pertemuan sih Pak kalau boleh tahu?

I: Wah banyak ya. Jadi ada *joint working group* juga itu pertemuan tingkat teknis JTF antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia untuk membicarakan isu-isu yang perlu diselesaikan. Nah itu sekarang sudah sampai *joint working group* ketiga. Harusnya akhir tahun ini dilaksanakan *joint working group* yang keempat di

Malaysia Tetapi karena waktunya terlalu mepet dan terlalu banyak agenda yang lain, jadi tidak bisa dilaksanakan. Nah di *joint working group* itu memang nanti juga suatu mekanisme di bawah MOU untuk menyelesaikan masalah isu-isu yang ada itu dibahas. Kalau misalnya isunya terlalu teknis nanti akan dibawa lagi ke bawah *joint task force*. Nah kalau banyaknya itu, kalau untuk JNPG itu sudah tiga *joint task force*. Kalau misalnya isunya terlalu teknis nanti akan dibawa lagi ke bawah *joint task force*. Nah kalau banyaknya itu, kalau untuk JNPG itu sudah tiga *joint task force*, saya lupa deh, mungkin gini aja. Itu termasuk kayak super cepat. Jadi sekarang meeting, ayo minggu depan lagi meeting. Dan itu memang kita juga tidak mau kehilangan momentum. Jangan sampai mereka akhirnya sudah tidak butuh lagi pekerja ladang. Terus kita baru maju. Nah, itu nanti susah.

A: Berarti Indonesia memanfaatkan momentumnya dengan benar-benar ya, Pak?

I: Iya. Memanfaatkan momentum dengan betul.

A: Saya sempat sih Pak ikut kelas umumnya Pak Hermono. Beliau tuh sangat apa ya, *passionate* kalau bahas tentang pekerja migran. Beliau juga bilang sebenarnya masalah ini tuh, masalah pekerja migran ini sebenarnya akarnya katanya korupsi ya, Pak.

I: Jalur-jalur itu masuk migrannya memang banyak korupsi. Karena gini Mbak, bagaimana kita memberantas calo yang memberikan janji kepada pekerja migran seperti ini misalnya. Kalau kita kan daftar biasa secara normal nih memenuhi dokumennya, kesehatan segala macam. Nah kalau calo, dia awal kasih duit pekerjaan migrannya. Misalnya dikasih 20 juta. Nih kamu saya kasih 20 juta buat keluarga kamu nih. Kamu berangkat sama saya. Mereka yang rata-rata berangkat kan mereka memang butuh pekerjaan untuk ekonominya. Memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya susah lah. Ya makanya kita harus sosialisasikan. Jangan mau ditipu oleh omongan manis calo. Karena walaupun dia ngasih duit di awal, nanti di belakangnya cekek semua udah. Karena kita juga pernah mengeluarkan bazar tenaga kerja di suatu daerah. Saya lupa itu udah lama banget. Itu semuanya dibiayai. Tinggal hadir, daftar. Tapi yang datang ternyata hanya beberapa orang. Karena kalah sama yang calo. Karena calo dikasih duit duluan. Susah kan.

A: Sebenarnya alasan saya melakukan penelitian ini juga karena pengalaman saya kuliah di Malaysia, Pak. Itu di asrama saya yang kerja semuanya orang Indonesia. Tapi ada satu orang, beliau sudah kerja delapan tahun di sana tapi gak punya visa kerja gitu. Itu kan saya penasaran gitu. Kenapa begitu?

A: Iya, karena mereka [pemberi kerja] juga butuh. Jadi mereka seperti melakukan pembiaran gitu loh ya. Karena dengan begitu mereka gak usah gaji mahal-mahal lah. Kalau misalnya mereka protes, kan kamu juga gak ada dokumennya. Udah lah. Seperti itu loh. Jadi memang mereka. Apa ya... Seperti menaruh posisinya orang kita itu di belakang. Di bawah gitu loh. Udah gak usah banyak ngomong. Yang penting lo kerja. Nih gue kasih duit gitu loh. Miris juga sih. Padahal itu juga membuktikan kan bahwa orang Indonesia memang benar-benar disukai di sana kan. Untuk bekerja kan. Karena orang Indonesia tuh rajin terus kayak nurut aja gitu. Udah terima aja lah. Makanya kadang-kadang sampai sakit, pusing.

A: Saya juga melihat ada fenomena yang sudah sukses kerja di sana suka bawa orang gitu Pak. Jadi dia udah sukses di sana, terus bawa suaminya, saudaranya, atau bawa tetangganya gitu.

I: Ah itu yang harus kita antisipasi juga. Kita kan makanya memberikan edukasi. Terutama kepada calon pekerja migran itu yang tidak mudah gitu loh. Dimana mereka kalau melihat aturan orang Indonesia tuh pokoknya, Uh kok ribet banget sih jadi pekerja migran. Mereka tidak melihat di balik itu gitu loh. Bahwa kamu tuh yang harus terlindungi. Tempat pekerjaan kamu tuh berbahaya dan yang rawan gitu loh. Jadi kamu tuh, ini cara kamu supaya bisa terlindungi ya ini. Ikuti secara prosesnya, prosedurnya. Insya Allah pasti aman. Tapi kalau sama calo ya, kita gak tahu. Kita gak tahu mereka udah bekerja di sana. Begitu ada kasus baru lapor. Kita bingung, gak ada datanya. Orang dari mana

A: Berarti kan ini sudah mulai di-enforce kan ya, Pak, OCS-nya. Berarti kalau sekarang, perbedaan yang sangat jelas dengan sebelum ada sistem itu?

I: Kalau dari data saya kebetulan tidak pegang karena data ada di BP2MI. Sama di Mas Erga di shelternya KBRI. Tapi dapat dilihat ekarang cuma ada berapa orang. Itu kan berarti kan mereka yang bermasalah udah gak sebanyak dulu. Kalau dulu kan sampai pergi ke puluhan, sampai di jalan-jalan gitu.

I: Saya bilang memang calo itu canggih. Dia punya duit yang sangat banyak buat iming-iming mereka [calon pekerja]. Dan mereka kan memang butuh duit, jadi kadang-kadang orang kalau udah butuh duit kan dia gak peduli apa. Kita abis kita apa istilahnya kita pembekalan, memberikan pembekalan kepada mereka. Nanti abis itu juga pasti lupa lagi. Banyak sekali yang lupa gitu loh. Karena mereka mikir ada duit, duit, duit. Aku mau cari duit gimana gitu loh. Nah itu yang harus edukasi mereka memang susah gitu loh. Tapi bukan berarti kita harus berhenti gitu. Harus sikat terus. Pokoknya kamu harus sampai mengerti. Masyarakatnya harus mengerti pentingnya perlindungan bagi diri mereka sendiri gitu loh. Karena kesian juga nanti yang jadi korban juga keluarganya. Karena data-datanya gak jelas. Gak ada di sistem. Nanti dengan dari *One Channel System* ini. Sebenarnya datanya ada kelihatan. Oh ini disini, disini. Jadi bisa ditelepon dulu seperti “Pak, anaknya berada dan kerja disini ya”.

A: Ternyata dari wawancara hari ini saya benar-benar dapat ilmu, Pak. Akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan penelitian saya. Terima kasih banyak ya, Pak.

I: Selamat dan sukses ya.

A: Aamiin, terima kasih, Pak. Assalamu'alaikum.

I: Waalaikumsalam.

## LAMPIRAN II

### Hasil Wawancara Kedutaan Besar RI Kuala Lumpur

Narasumber : Erga Grenaldi

Jabatan : Atase Ketenagakerjaan KBRI KL

Tanggal : 17 November 2022

Media : *Zoom Meeting*

Catatan : Karena hasil rekaman wawancara masih berada di pihak KBRI KL dan penulis belum mendapatkan aksesnya hingga saat tulisan ini dibuat, maka lampiran ini hanya akan berisi intisari dari wawancara yang berhasil penulis catat selama prosesnya.

1. Bagaimana KBRI KL berperan dalam proses negosiasi MoU Perlindungan PMID (2016-2022)?

⇒ KBRI KL berperan sebagai delegasi pemerintah Indonesia bersama dengan badan lainnya seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang menjadi ketua delegasi.

2. Mengapa banyak pekerja migran Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia untuk mencari pekerjaan? Apa faktor penarik dan pendorongnya?

⇒ Ada *supply and demand*, ada permintaan yang saat tinggi didukung oleh banyaknya pekerja migran dari Indonesia. Lalu persamaan budaya antara Malaysia dan Indonesia, terutama bahasa sehingga tidak terlalu menyulitkan dalam komunikasi. Selain itu faktor geografis yang sangat dekat sehingga memudahkan perpindahan pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Faktor sejarah

yang sudah sangat lama terjalin, contohnya banyak saudara dan kerabat. Faktor pendapatan yang relatif lebih tinggi.

3. Mengapa banyak terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap PMI di Malaysia?

⇒ Pelanggaran banyak terjadi mayoritas di sektor rumah tangga yang berangkat secara non-prosedural, mereka sering tidak memiliki syarat dan kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki saat memutuskan untuk bekerja sehingga tidak jarang mengalami kekerasan dan eksploitasi dari pemberi kerja saat melakukan kesalahan. Sayangnya karena mereka berangkat secara non-prosedural, pemerintah Indonesia tidak mempunyai data sehingga potensi pekerja untuk dieksploitasi tanpa pengawasan meningkat. Padahal pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamalkan UU No. 18 tahun 2017 tentang Penempatan dan Perlindungan PMI.

4. Bagaimana hukum peradilan Malaysia melihat serta menangani permasalahan pekerja migran?

⇒ Secara PERDATA: biasanya terkait hak pekerja seperti gaji yang tidak dibayarkan. Terdapat mekanisme melalui pengadilan buruh atau Mahkamah Perusahaan sesuai dengan Akta Kerja 1955, siapa saja pekerja asing yang mengalami pelanggaran bisa melaporkan jika gagal dalam tahap mediasi di Jabatan Tenaga Kerja. Jika masih tidak setuju bisa banding ke Mahkamah Tinggi. Namun, yang bisa melakukan ini hanya pekerja yang memiliki gaji di atas 5000 ringgit. Kebanyakan PMI khususnya sektor domestik memiliki gaji jauh di bawah gaji minimum tersebut.

Secara PIDANA: biasanya berupa tindak perdagangan orang, hukum yang berlaku tergantung dari pelanggaran yang terjadi.

5. Faktor apakah yang menyebabkan adanya interdependensi antara Indonesia dan Malaysia atas isu pekerja migran?

⇒ Interdependensi terjadi karena adanya *supply* dan *demand* tadi. Contohnya saat Covid-19, Malaysia membutuhkan banyak sekali PMI untuk sektor ladangnya. Karena tidak ada orang Malaysia yang mau memetik kelapa sawit milik mereka, banyak kelapa sawit yang akhirnya busuk dan tidak bisa dipanen.

6. Mengapa adanya MoU antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dianggap penting dalam proses pengiriman pekerja migran? Apa yang menjadi pembeda dari ada dan tidaknya MoU?

⇒ MoU bertindak sebagai *bridging*/komitmen antara kedua negara. Sangat penting. Tanpa MoU tersebut, pemerintah Indonesia tidak bisa mengamalkan UU No. 18 Tahun 2017 di mana proses penempatan MoU itu wajib untuk melalui sistem satu kanal sehingga kami bisa melakukan perlindungan secara maksimal karena tidak ada datanya. Akibatnya, ketika terjadi pelanggaran terhadap PMI, kami tidak memiliki *standing point* yang kuat untuk menuntut keadilan mereka kepada pihak Malaysia.

7. Apa saja kepentingan yang Indonesia perjuangkan dalam perumusan MoU?

⇒ Kepentingan utama Indonesia adalah meningkatkan perlindungan PMI, masalah gaji (upah minimum dari 900 ringgit menjadi 1500 ringgit serta permasalahan gaji yang kerap tidak dibayarkan/ditunggak), penempatan yang harus melalui jalur resmi, kontrak kerja yang disepakati sebagai syarat

pengeluaran visa kerja, OCS untuk memantau seluruh data pekerja yang masuk ke Malaysia sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017.

8. Bagaimana alur negosiasi dari proses inisiasi, perundingan, hingga penandatanganan MoU Perlindungan PMID di Malaysia? Berapa kali pertemuan dilaksanakan, kapan, dan apa saja intisari dari tiap pertemuan?

⇒ September 2021 melakukan perundingan secara *online*, sekitar 4-6 kali pertemuan membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh PMID di Malaysia. Akhirnya di bulan Februari menemukan titik temu dan MoU ditandatangani pada bulan April 2022.

9. Mengapa perundingan MoU antara Indonesia-Malaysia tersebut sempat terhambat?

⇒ Adanya perbedaan kebijakan antara kedua belah pihak. Malaysia dengan sistem SMO itu bertentangan dengan UU RI No. 18 Tahun 17.

10. Mengapa akhirnya kedua negara setuju untuk memulai kembali proses negosiasi? Bagaimana cara kedua negara berkompromi sehingga dapat mencapai kesepakatan atas rancangan akhir MoU?

⇒ Malaysia membutuhkan tenaga kerja di sektor perkebunan/ladang sawit mereka karena tidak ada warga Malaysia yang mau bekerja di sektor tersebut. Kami melihat hal ini sebagai kesempatan. Jadi sebelum kami menyetujui permintaan Malaysia tersebut, kami ajukan syarat untuk menyelesaikan MoU Perlindungan PMID terlebih dahulu.



11. Apakah ada faktor eksternal atau tekanan publik dari kedua belah pihak yang memengaruhi percepatan proses perundingan dan penandatanganan MoU oleh kedua negara?

⇒ Tentu saja ada. Dari sisi Indonesia, banyak orang yang ingin bekerja ke Malaysia karena pandemi Covid-19 banyak membuat masyarakat tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan dari sisi Malaysia, banyak perusahaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja dan mereka menuntut Malaysia untuk mengirimkan pekerja dari Indonesia. Kekurangan tenaga kerja ini mempengaruhi pendapatan negara khususnya di sektor kelapa sawit. Selain itu, Malaysia juga sedang dimonitor oleh dunia internasional terkait dengan kerja paksa yang mempengaruhi citra perusahaan-perusahaan lokalnya.